

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, keberadaan tata kelola keuangan sebagai prinsip pokok dalam instansi pemerintahan sudah seharusnya diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Hal ini didukung oleh besarnya tuntutan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Transparansi selalu dikaitkan dengan pelaporan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan semua sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini tidak terlepas dari ketaatan pengelolaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti PP Nomor 71 Tahun 2010. Sementara akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan berbagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*). Dalam konteks hubungan antara principal dan agen, pemerintah bertindak sebagai agen berkewajiban untuk menyajikan informasi yang relevan bagi para pengguna informasi keuangan. Sementara di sisi lain, semua

stakeholders lainnya merupakan principal yang berkepentingan dengan akuntabilitas laporan keuangan dan membuat berbagai keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah setiap periodenya harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu dalam mengevaluasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang harus dipenuhi agar mempunyai informasi yang bermanfaat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang

diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektifitas SPI Pemerintah Daerah yang belum optimal.

Identifikasi atas faktor-faktor yang potensial menyebabkan laporan keuangan menjadi belum (kurang) berkualitas, merupakan langkah penting untuk selanjutnya melakukan berbagai penyempurnaan di masa mendatang. Ariefsetya (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi sedikitnya ada 3 faktor yang dipertimbangkan signifikan dalam mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: 1) sumber daya manusia, 2) sistem pengendalian intern, 3) penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sementara Ikang Murapi (2016) dalam penelitiannya mengidentifikasi 4 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: 1) kompetensi sumber daya manusia, 2) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 3) pemanfaatan teknologi informasi, 4) sistem pengendalian intern.

Menurut Sukmaningrum (2012) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus

memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah sendiri yang biasa disebut SAKD dapat diartikan sebagai Sistem akuntansi yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 232).

Dalam proses mengelola keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Sistem akuntansi ini sendiri harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam peraturan tersebut, berisikan aturan-

aturan serta pedoman yang baik dan benar dalam pelaporan keuangan, sehingga apa yang akan dilaporkan akan menjadi transparan dan akuntabel.

Salah satu daerah atau Pemerintah Kota yang selama tiga tahun berturut-turut memperoleh opini WDP atas laporan keuangannya adalah Pemerintah Kota Kupang. Opini ini sudah diperoleh Pemerintah Kota Kupang sejak tahun 2017, dan terakhir adalah untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2019. Adapun sebagai agen, Pemerintah Kota Kupang perlu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berpotensi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangannya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh BPK selama tiga tahun terakhir.

Adapun opini BPK atas LKPD Kota Kupang tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Opini Audit BPK Berdasarkan Tahun LHP atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun LHP	Opini Audit BPK
2017	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2018	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
2019	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

Sumber : IHPS II BPK RI Tahun 2019

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kota Kupang mendapatkan opini WDP sebanyak 3 kali berturut-turut. Namun masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan di Kota Kupang yang mengindikasikan bahwa pada pemerintah Kota Kupang masih banyak terdapat kelemahan-

kelemahan, baik itu kelemahan pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, atau kelemahan pada sistem pengendalian intern. Kelemahan tersebut dapat disebabkan oleh kurang memadainya kualitas SDM pengelola keuangan pada pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi, ataupun penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil evaluasi oleh BPK, menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian intern telah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal.

BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, terdiri atas : 1) Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, 2) Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, 3) Terlambat menyampaikan laporan, 4) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, 5) Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur

penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang diatas, maka saya merasa tertarik untuk melakukan uji empiris sehubungan dengan fenomena yang terjadi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kota Kupang ?
2. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang ?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh

secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan
Pemerintah Daerah Kota Kupang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran dari kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada penelitian dibidang kualitas laporan keuangan guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kualitas laporan keuangan yang ada di SKPD Kota Kupang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas SDM, penerapan SPI, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuaangan pemerintah daerah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi sektor publik, khususnya kualitas laporan keuangan, dan dapat menjadi media informasi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktik

- a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah.

b. Bagi SKPD Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam meningkatkan mutu kualitas laporan keuangan SKPD Kota Kupang.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana pengaruh kualitas SDM, penerapan SPI, penerapan standar akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.